JURNAL ILMIAH

PADMA SRI KRESHNA

APLIKASI *MODERNIZATION THEORY* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Nani Noor Kurniyati

BELAJAR DARI PENGELOLAAN BAHARI JEPANG
Oktiva Anggraini

UKURAN BANGUNAN RUMAH PENDAPA AGUNG DALEM MANGKUBUMEN YOGYAKARTA
Prawatya Widyanto

MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PASCA BENCANA
Puji Qomariyah

MEREDIFINISI PARADIGMA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KAJIAN SOSIAL POLITIK
Rahmat Slamet Suyoto

PELAKSANAAN PROGRAM REKONSILIASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PASCA GEMPA BUMI TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Retno Kusumawiranti

PEMIKIRAN KETAT *(RIGOROUS)* KOMUNIKASI ARSITEKTUR PADA PROSES BERARSITEKTUR
Slamet Anambyah

KALIGRAFI DI PENDAPA AGUNG DALEM MANGKUBUMEN YOGYAKARTA ADALAH HIASAN, PRASASTI DAN SIMBOL AGAMA RESMI YANG DIANUT KERATON YOGYAKARTA
Sukirman

PENGUASAAN TANAH DAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DI YOGYAKARTA
Tiwuk Kusuma Hastuti

Padma Sri Kreshna	Vol. 1	No. 12	Yogyakarta Mei 2009	ISSN : 1411 - 8114

DAFTAR ISI

JURNAL ILMIAH PADMA SRI KRESHNA

Vol. 1 No. 12 Mei 2009

Nani Noor Kurniyati	*1 - 10*	Aplikasi *Modernization Theory* dalam Pembangunan Ekonomi
Oktiva Anggraini	*11 - 22*	Belajar dari Pengelolaan Bahari Jepang
Prawatya Widyanto	*23 - 35*	Ukuran Bangunan Rumah Pendapa Agung Dalem Mangkubumen Yogyakarta (Studi kasus ukuran panjang tiang utama)
Puji Qomariyah	*36 - 42*	Membangun Kemandirian Masyarakat Pasca Bencana
Rahmat Slamet Suyoto	*43 - 49*	Paradigma Meredifinisi Pembangunan Kepariwisataan Kajian Sosial Politik
Retno Kusumawiranti	*50 - 58*	Pelaksanaan Program Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Slamet Anambyah	*59 - 77*	Pemikiran Ketat *(Rigorous)* Komunikasi Arsitektur Pada Proses Berarsitektur
Sukirman	*78 - 90*	Kaligrafi Di *Pendapa Agung* Dalem Mangkubumen Yogyakarta Adalah Hiasan, Prasasti dan Simbol Agama Resmi yang Dianut Keraton Yogyakarta
Tiwuk Kusuma Hastuti	*91 - 99*	Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial Masyarakat Di Yogyakarta

BELAJAR DARI PENGELOLAAN BAHARI JEPANG

Oktiva Anggraini [1]

ABSTRACT

The Fishery Agency of Japan (FAJ) played an integral dan important role by supporting the fisheries industry through its drafting of various pieces of legislation. The triangular relationship among FAJ bureaucrats, legislator and the fishing industry has been institutionalized. FAJ bureaucrats try to maximize their utility by regulating illegal fishing by other countries and setting high quotas with political support fishery cooperative associations (FCA) and public interes cooperation. Based on Japan's experiences in developing of fishery sector, there are several steps can be adopted in Indonesia:1) revitalization of Ministry of Marine Affairs and Fisheries and fisheries cooperation;2) law enforcement in facing illegal fishing,3) affirmative policy for fishery' stakeholders and stock-enhancement.

Key words: *fishery, cooperation*

PENDAHULUAN

Dalam publikasi FAO 2007 disebutkan bahwa kondisi sumber daya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudra India dan Samudera Pasifik sudah menunjukan kondisi *full exploited*.Bahkan, di perairan Samudra Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada *over exploited*. Artinya, di kedua perairan tersebut saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran. Akan tetapi pada bagian lain yakni pada Dokumen Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 menargetkan bahwa produksi perikanan tangkap pada 2009 akan mencapai 5,12 juta ton. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dalam periode 1994-2004 rata-rata mencapai 3,84% per tahun (Sindo, 21 Maret, 2003). Menurut Suhana Kepala Riset dan Kebijakan Kelautan pada Pusat Pengkajian Kelautan danPeradaban Maritim, dengan target pertumbuhan perikanan tangkap tetap sebesar 3,84% per tahun, produksi perikanan tangkap pada 2009 akan *full exploitation* di seluruh perairan Indonesia.Bahkan, kalau dihitung dengan menggunakan metode *time series forecasting* terlihat bahwa kondisi sumber daya ikan Indonesia sebelum 2015 akan *over exploited*.

Selain itu, permasalahan perikanan di Indonesia diperparah lagi dengan belum optimalnya pemerintah dalam menindak praktek *illegal fishing*[2] dan rusaknya perairan Indonesia. Dari total luas wilayah perairan Indonesia yang sekitar 5,7 juta kilometer persegi, hanya 1,8 juta kilometer persegi yang kondisinya masih baik. Artinya sekitar 20%, perairan Indonesia kondisinya rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan terbanyak ada di

[1] ***Oktiva Anggraini*** *adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIPOL UWMY*

[2] Setiap tahun lebih dari 3000 kapal asing melakukan kegiatan *illegal fishing* di Indonesia. Akibat kegiatan itu, Indonesia kehilangan pendapatan sekitar 3 miliar hingga 6 miliar dollar AS per tahun. Akumulasi selama 30 tahun terakhir kerugian Indonesia mencapai 29 miliar dolar AS. Dampak yang lebih luas adalah pada industri perikanan. Indonesia menjadi macet dan menghilangkan kesempatan bekerja para nelayan.(http: www.kompas.online.com/blue water crime/akses 2 Desember 2008)

ISSN : 1411-8114

wilayah Indonesia bagian barat. (*Kompas*, 28 Januari, 2009). Bila kondisi demikian tidak segera diperbaiki, sektor kelautan dan perikanan yang seharusnya menjadi pilar keunggulan kompetitif bangsa dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran rakyat, bisa jadi akan lebih banyak dimanfaatkan oleh investasi negara lain dan semakin dikhawatirkan kelestariannya.

Pembangunan ekonomi di sektor kelautan Indonesia selama ini, masih jauh lebih kecil daripada potensinya. Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya baru mampu menyumbangkan 20,06% dari total Produk Domestik Bruto. Dibanding negara lain yang jauh lebih kecil dari Indonesia (seperti Nowergia, Thailand, Philipina dan Jepang) kegiatan ekonomi kelautannya (perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi serta industri) telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB mereka, yakni 25-60% per tahun (Rokhmin Dahuri, 2001). Khusus Jepang, dari sektor perikanan tangkap menghasilkan 5.586.000 metric tons dan dari perikanan budi dayanya menghasilkan 83.000 ton di tahun 2006. Meski sekitar 46,9% dari 83.470 nelayan Jepang berusia manula (lebih dari 60 tahun), dalam optimalisasi pengelolaan potensi baharinya tidak diragukan berkat dukungan ekonomi politik pemerintah dan teknologi yang tinggi.(*Japan Fishery Product Annual Report* 2007).Dengan sederet permasalahan kompleks di Indonesia tersebut, penulis ingin melihat komparasi Jepang dan Indonesia dalam pengelolaan potensi bahari. Memang, kurang adil bila melihat perbedaan kondisi di Jepang yang amat modern dengan membandingkan kebijakan penanganan perikanan dan kelautan di Indonesia yang sebagian besar masih bersifat tradisional. Namun, melihat hampir sebagian besar ekspor Indonesia (70%) diarahkan ke Jepang, melalui tulisan ini akan dikaji opsi-opsi pengelolaan perikanan di Jepang berikut pelestarian lingkungan yang gencar dilakukan di negeri Sakura ini dan kemungkinannya diaplikasikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dari *Stock Enhancement* hingga Kebijakan Lingkungan Jepang

1. Penerapan Sistem Bisnis Perikanan Budidaya secara Terpadu hingga Penerapan TAC *(Total Allowable Catch)*.

Pembangunan perikanan budidaya Jepang dibangun dengan pendekatan sistem perikanan terpadu sehingga arah dan kebijakan pembangunan merefleksikan kegiatan dari sub sistem perikanan yang meliputi pembangunan sub sistem perbenihan, sub-sistem usaha budidaya, sub-sistem pasca panen dan pemasaran yang ditunjang sub-sistem kesehatan ikan dan lingkungan serta pembangunan sub-sistem prasarana budidaya perikanan. Setiap kebijakan perikanan diformulasikan oleh suatu komisi yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah *(Fisheries agencies or The Fishery Agency of Japan (FAJ))*, wakil-wakil dari kelompok petani yang diutus Federasi Koperasi Perikanan Nasional dan tenaga ahli. Dengan demikian, keberpihakan pemerintah terhadap nelayan maupun kepentingan industri perikanan nasional cukup kuat. Melalui komisi inilah, mulai soal jaminan kesehatan nelayan hingga besaran impor produk ikan ditentukan. Meski profesi nelayan di Jepang identik dengan *kitanai*,

kitsui dan *kiken* (kotor, keras dan membahayakan), akan tetapi posisi mereka secara ekonomi dan politik amat menentukan (http:// www.atani tokyo.blogspot.com.)

Kebijakan-kebijakan di Jepang dapat berjalan dengan baik karena sistem pengelolaan perikanan berbasis pada hak (*Right-Based Fisheries System*), berbasis pada masyarakat (*Community Based Fisheries Management*) dan adanya sistem lisensi (*Licensing Fisheries System).* Sistem perikanan yang berbasis pada hak di Jepang (*hak iriai)* terdiri dari *common fishing right* yang diberikan kepada koperasi perikanan (di Jepang dikenal dengan sebutan FCA: *Fisheries Cooperative Assosiation*), *set net fishing right* yang diberikan pada individu atau group nelayan serta *demarcated fishing right* yang juga diberikan kepada koperasi perikanan dan untuk areal laut tertentu misalnya untuk budi daya rumput laut. Sistem pengelolaan perikanan yang berbasis pada masyarakat dilakukan dengan cara *co-management* di bawah pengawasan koperasi perikanan (FCA). Fungsi FCA adalah membuat pengelolaan sumberdaya perikanan lebih efisien, menciptakan *economic opportunity* untuk pembangunan regional, mempromosikan tentang kesehatan lingkungan, mengembangkan pendidikan dan penelitian yang berhubungan dengan perikanan, membangun inisiatif untuk pemeliharaan sumberdaya perikanan serta memberikan kontribusi dalam melindungi supply ikan Jepang agar tetap stabil. Sedangkan sistem lisensi diberikan kepada individu, kelompok nelayan atau perusahaan perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di laut lepas atau perikanan jarak jauh (*distant waters fisheries*). Lisensi ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau propinsi dan lisensi bukan merupakan hak milik.

Untuk mengatasi *overfishing* di bidang perikanan tangkap, Jepang mengadopsi kebijakan quota dengan *limited entry system* yang menunjukkan bahwa tidak terjadi pengurasan atau eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya perikanan dan kelautan dengan menerapkan TAC (*Total Allowable Catch*) sejak tahun 1997. Dengan *quota* maka masing-masing pelaku perikanan dan kelautan memperoleh kepastian terhadap bagian dari tangkap yang diperbolehkan, sehingga tidak perlu berlomba untuk mencari ikan (*race for fish*). Sedangkan yang dimaksud dengan *Limited entry* adalah kebijakan yang hanya memperkenankan nelayan atau armada yang terdaftar saja untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan. TAC diterapkan dalam penangkapan ikan *Saury, Alaska Pollack, Jack Mackerel, Sardine, Common Mackerel, Spotted Mackerel, Common Squid* dan *Snow Crab.* Sebagai pelengkap sistem TAC pada tahun 2000 Jepang menerapkan TAE (*Total Allowable Effort*). Selain itu juga diterapkan penutupan musim, pembatasan areal penangkapan, pembatasan ukuran jaring dan lain-lain. Salah satu faktor yang cukup menentukan dalam penerapan *quota* (*limited entry*) adalah harus didukung oleh *enforcement* yang kuat. Untuk hal ini Jepang memiliki kepastian hukum terhadap produksi perikanan (UU Koperasi Perikanan, UU Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, dll) dan pada seluruh aspek dalam sistem perikanannya (produksi, pengolahan,

distribusi komunitas dan konsumsi) dalam Undang-Undang Fundamental perikanannya (*Suisan Kihon Hou*).

JFA dalam perjalanannya sebagai organisasi solid yang memayungi 400 organisasi dan perusahaan industri perikanan, melakukan penetapan sistem sertifikasi Jepang untuk hasil-hasil perikanan yang dikenal dengan *Marine Eco-Label (MEL Japan)*. Dengan mengacu pada pedoman FAO 2005, *MEL Japan* bertujuan membuat sebuah siklus positif melalui penerbitan sertifikat *eco-label* sehingga: 1) semangat nelayan dan *stakeholder* perikanan meningkat dalam peran sertanya mengelola sumber alam secara sukarela dan individu; 2) kerjasama nelayan, ilmuwan, pengelola perikanan meningkat, dan 3) nelayan semakin aktif menyumbang proses pengumpulan data dan kemajuan informasi perikanan. *MEL Japan* dikembangkan dengan biaya yang murah, sekedar untuk pengoperasian sistem saja, namun mampu menunjang keberlanjutan pengujian produk perikanan Jepang.

Di samping pengelolaan potensi bahari yang tepat, Jepang menciptakan pre kondisi seperti keinginan politik untuk mengimplementasikan perubahan dan membuat persetujuan antar negara untuk penggunaan laut secara bersama. Pengalaman penerapan kebijakan perikanan Jepang ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan pengelolaan perikanan dimana kelestarian sumberdaya terjaga dan diperoleh keuntungan maksimum.

2. Kegiatan *stock enhancement* (pengkayaan stok ikan)

Jepang telah melaksanakan kegiatan *stock enchancement* (pengkayaan stok ikan) sejak tahun 1963 dengan target area Laut Kepulauan Seto seluas 18.000 km2 yang dihubungkan dengan laut lepas oleh tiga selat. Dengan pengkayaan stok ini, Jepang dapat mempertahankan hasil tangkapan pada level 15.000 ton sejak tahun 1986 sampai tahun 1995. Demi program ini, pemerintah Jepang telah mengeluarkan biaya sebesar US$ 850.000 pada tahun 1968 dan meningkat tajam pada tahun 1996 mencapai US$ 59 juta. Mahalnya biaya ini sebanding dengan hasilnya kemudian. Jepang dapat meningkatkan perekonomiannya melalui sektor perikanan, khususnya stok ikan di perairannya terjamin keberadaannya sehingga besaran hasil tangkapannya pun terjamin. Para nelayan Jepang juga dihimbau untuk melepas hasil tangkapan yang besaran dan kualitasnya tidak sesuai dengan standar pasar Grosir sentral. Upaya ini tidak lain untuk meremajakan dan sebagai proses pengembangbiakan serta menjaga kesinambungan ekosistem laut. Jepang menghadapai sejumlah masalah dalam penyediaan stok ikan Pollack, atka makarel, squid dan sardines sehingga sampai Maret 2007, terdapat 51 program *recovery stok enhancement* yang mencakup 76 jenis species ikan yang berbeda. Kebijakan ini untuk menyikapi perubahan potensi pedesaan Jepang yang mulai menurun dalam hal budidaya perikanan dan perubahan selera masyarakat Jepang yang telah mulai kebarat-baratan, dengan memilih produk-produk impor berbahan makanan dari Barat.(Japan Fishery Product Annual Report 2007).

3. Berfungsinya Pasar Grosir Sentral

Di Jepang terdapat tiga pasar grosir sentral yang ditopang dengan

Undang-Undang Pasar Grosir. Dengan dasar peraturan ini juga, masalah distribusi produk, kestabilan transaksi dan harga sehingga konsumen dan produsen dapat mengkonsumsi bahan pangan segar tanpa adanya kecemasan akan adanya manipulasi ataupun KKN yang terjadi dalam perdagangan. Komisi bagi *wholesaler* misalnya telah diatur dalam perda setempat: untuk produk perikanan sebesar 5,5%, untuk sayuran 8,5% , buah sebasar 7% dan daging 3,5% dan untuk bunga dan tanaman hias mendapat 9,5%. Proses lelang dilakukan dengan dua cara yakni secara mekanik (*mechanized auction*) melalui komputer dan tradisional manual. Khusus produk daging dan bunga, dilakukan dengan cara mekanik sedangkan produk lain masih dengan cara tradisional manual.

Salah satu komoditas yang diatur ketat dalam perlelangan pasar grosir sentral adalah ikan tuna. Sebagai contoh yang terjadi di Pasar Tsukiji Jepang yang merupakan tempat lelang ikan tuna terbesar di dunia, produk yang akan dilelang diberi nomor urut dan satuan berat dan di*display* menurut *grade* pada tempat yang telah ditentukan. Harga lelang di pasar grosir ini sering menjadi patokan harga internasional hasil perikanan. Di sini, para *wholesaler, intermediate wholesaler* harus mendapat ijin dari pemda setempat.Area lelang dilengkapi dengan bank yang memudahkan pembayaran transaksi, alat angkut bermotor maupun alat angkut tradisional. Fasilitas lain bagi pasar ikan berupa pabrik dan mesin es, *supply* air bersih dan berdirinya toko pendukung yang menjual kertas pembungkus, *boots*, bahan pengemas dan aneka pisau.Sebagai negara yang amat efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam, Jepang mendaur ulang semua semua limbah dan sampah dari pasar grosir sentral.

Kementrian Pertanian dan Kehutanan dan Perikanan Jepang sejak tahun 1923 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membangun pasar grosir sentral yang tujuannya:

a. Sebagai wadah beragam produk segar *(collection)* dalam jumlah banyak dari dalam maupun luar negeri
b. Penentu harga yang adil
c. Distribusi dari produk yang terkumpul ke dalam jumlah dan ukuran yang lebih kecil untuk dijual kepada *stock purchasers*.
d. Pengembangan akutansi yang sehat melalui pembayaran yang harus dilakukan sesegera mungkin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
e. *Prompt information* (penyediaan informasi terkini).

Dengan sederet fungsi tersebut, nampak jelas peran pasar grosir sentral dalam transaksi pangan dalam negeri dan luar negeri. Pasar Grosir Sentral merupakan mata rantai yang tidak dapat diabaikan dalam distribusi produk perikanan tangkap maupun budidaya ikan di Jepang. Melihat tingginya konsumsi ikan di Jepang, yang pada umumnya dikonsumsi dalam kondisi mentah, penanganan kebersihan, kesegaran ikan dan higienitas lingkungan dari mulai hulu hingga hilir menjadi prasyarat pemasaran ataupun distribusi ikan di dalam negeri.

Proses seleksi produk di ajang pasar Grosir Sentral Jepang, sepintas nampak 'kejam' bagi eksportir-ekportir

dari Indonesia misalnya, yang sering 'kedodoran' dalam hal kualitas. Akan tetapi, justru berangkat dari seleksi produk yang ketat inilah, nelayan, koperasi nelayan bahkan organisasi nelayan Jepang memacu diri dengan peningkatan kualitas budi daya maupun cara penangkapan agar produknya diminati di pasar grosir sentral. Pada bagian lain, meski tercatat sebagai negara dengan *distant wafer fishing fleet* yang disegani dunia, impor hasil perikanan Jepang masih tinggi karena hasil produksi nasional belum mencukupi kebutuhan konsumsi domestik. Impor hasil perikanan mencapai separuh dari kebutuhan nasionalnya. Impor bahan pangan terbesar Jepang adalah produksi perikanan dengan nilai sekitar US$ 14-16 milyar per tahun, dengan dominasi impor ikan tuna disusul udang. Secara bilateral, Jepang merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Mayoritas ekspor hasil perikanan Indonesia ditujukan ke Jepang dengan nilai mencapai US$ 1 milyar/tahun. Selama belasan tahun, udang Indonesia menguasai pangsa pasar terbesar di Jepang tetapi mulai tahun 2004, posisi Indonesia menjadi nomor dua setelah Vietnam. Untuk ikan tuna, Indonesia termasuk suplier utama yang diperhitungkan. Bahkan untuk jenis *yellowfin* segar dan beku, Indonesia juga menguasai pangsa pasar cukup besar, hanya saja akhir-akhir ini dikeluhkan adanya penurunan ukuran dan kualitas.Hal inilah yang pada gilirannya berpulang pada pentingnya kebijakan *restocking* di Indonesia yang mendesak untuk dilakukan sehingga fenomena penolakan ekspor Jepang tersebut tidak berulang.

4. Meningkatnya kesadaran Lingkungan Nelayan Jepang

Mulai akhir tahun 1980-an, gerakan-gerakan masyarakat untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan banyak bermunculan dari komunitas nelayan. Gerakan ini berujud penanaman pohon di *rias coast* (pantai yang berkelok-kelok, berbukit dan berteluk-teluk), daerah aliran sungai (DAS) dan gunung. Gerakan ini menyebar ke seluruh penjuru Jepang sehingga semua *rias coast* seperti hutan lindung. Bagi masyarakat Jepang, terutama komunitas nelayan (*ryoshi*), lingkungan laut (*umi*) tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hutan *(mori)* di darat. Meskipun kondisi hutan tidak secara langsung mempengaruhi kondisi hutan, kelestarian hutan sangat memungkinkan terciptanya kelestarian lingkungan laut dengan segala biota di dalamnya. Air sungai hutan yang lestari akan banyak mengandung *myobi* yang dikenal sebagai makanan utama plankton di laut. Sedangkan plankton adalah sumber makanan bagi biota laut seperti ikan, kerang dan terumbu karang. Dalam kepercayaan orang Jepang, segala bentuk kerusakan lingkungan hutan akan menimbulkan kerusakan lingkungan darat maupun laut.

Kegiatan penyelamatan lingkungan ini bermula dari kampung Krakua, Miyagi Prefecture yang berhasil dengan penyelamatan biota laut dan sekaligus perlindungan hutannya. Sebelumnya di daerah ini, tepatnya di teluk Kesen-Numa, Miyagi prefecture, di tahun 1970-an, keberadaan tiram hampir punah. Hal ini disebabkan gundulnya hutan di daerah aliran sungai, eksploitasi

hutan yang berlebihan untuk keperluan industri dan rumah tangga sehingga berakibat sedikitnya air bersih yang mengandung *myobi* (bahan-bahan mineral bergizi) yang sangat baik untuk makanan biota laut dan tiram. Kondisi ini menyadarkan seorang nelayan *oyster*, Hateyama Shigeatsu untuk menggerakkan para nelayan di desanya menanam pohon Koyoju sepanjang 20 kilometer dimulai dari garis pantai menuju ke gunung serta menjaga kelestarian gunung Murone-Yama.

Setelah berjalan dua puluh tahun lamanya, nelayan teluk Kesen-Numa akhirnya menuai hasilnya. Budi daya tiram di daerah tersebut kian menggairahkan, pendapatan masyarakat pun setempat meningkat. Bahkan, tiram di daerah ini sangat terkenal di Jepang karena kebersihan, kelezatan dan ukurannya yang sangat besar. Selanjutnya, gagasan Hateyama yang dikenal dengan mottonya *Mori wa Umi no Kottobi* (Hutan adalah Pacar Laut) ini menjadi referensi Depdikbud Jepang atau Monbusho dalam merancang pembelajaran dan penyelamatan lingkungan kepada sekolah SD dan SMP di Jepang (http://ocean.juplog.com/utility.tb)

Pada bagian lain, pemerintah Jepang membangun *co-management* di Shiretoko *World Natural Heritage*, di timur laut propinsi Hokaido. Shiretoko dikenal sebagai daerah penghasil ikan dan sektor perikanan menjadi tumpuan perekonomian daerah ini. Di kawasan tersebut dibangun pola kerjasama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat nelayan untuk mengembangkan potensi ikan unggulan daerah seperti *salmonids, walleye pollock, arabesque greenling, Pasific cod, Steller sealion, seals dan spectacled guillemot.* Pengayaan stok ikan ini sekaligus diikuti dengan kegiatan monitoring, pusat informasi dan pusat konservasi jenis-jenis ikan tersebut. Awal sosialisasi program ini, nelayan lokal merasa akan tergeser pasarnya dengan adanya program ini. Namun dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam pembenihan dan paska produksi, program ini akhirnya sarat dengan dukungan masyarakat. Dampaknya, produksi ikan di Shiretoko pada tahun 2006 mencapai 22.996 juta yen dan wisatawan yang berkunjung membelanjakan tak kurang dari 36.617 milyar yen. Keberhasilan pengembangan *co-management* di *Shiretoko World Natural Heritage area* ini pada gilirannya memunculkan *pendekatan Shiretoko* (Makino, 2009:207-210).

Dari Revitalisasi DKP hingga Penggalangan Modal Sosial Nelayan

Sebagai ujung tombak dan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia, peran Departemen Kelautan dan Perikanan terlihat masih minim dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan nasional. Berbeda dengan perumusan kebijakan sektor kelautan di Jepang yang nampak sudah terstruktur dengan baik, di Indonesia, ada sejumlah departemen yang terkait dalam pengelolaan potensi bahari. Departemen yang dimaksud meliputi Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Departemen Pekerjaan Umum. Usaha untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan

dan mensosialisasikan program dan kegiatan pengelolaan laut telah diprakarsai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) namun masih sebatas menginventarisasi masalah dalam jajag pendapat, lokakarya dan seminar nasional. Kebijaksanaan nasional di bidang kelautan dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi kendala, di antaranya pada aspek legal mengingat masing-masing departemen merasa paling berhak, minimnya dukungan politik, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pembangunan kelautan dan perikanan.

Belajar dari kisah sukses Jepang dalam pengelolaan potensi bahari, berikut ini ada sederet langkah yang dapat dilakukan pemerintah dan *stakeholder* perikanan:

a. Bila selama ini pembangunan perikanan didekati dari pendekatan peningkatan produksi, selebihnya di masa datang harus didekati dengan peningkatan kelestarian sumber daya ikan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan nelayan jangan hanya didekati dengan pendekatan bantuan alat produksi, dana stimulan tetapi perlu didekati dengan mengembangkan mata pencaharian alternatif dengan penyuluhan dan pendampingan. Dalam hal ini pendampingan lebih berorientasi kepada pengembangan keswadayaan dan kemandirian berbasis pada potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Panen rumput laut Indonesia hanya dihargai 0,5 dollar AS/kg untuk ekspor ke Jepang, sebaliknya Indonesia mengimpor agar-agar, kosmetik, obat-obatan berbahan dasar rumput laut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Untuk itulah, industri pengolahan produk perikanan hendaknya makin didorong pertumbuhannya. Sedangkan untuk dana stimulan dan bantuan alat produksi melalui LEMP atau PEMP yang telah dikucurkan pemerintah cukup banyak namun yang perlu diwaspadai adalah kemanfaatannya dan ketepatan sasaran. Kasus perguliran dana PEMP melalui BUKOPIN di Bantul dan Gunung Kidul tahun 2006-2007 yang tidak tepat sasaran misalnya hanya sebagian contoh dari sekian banyak ketidaktepatan ontoh dari sekian banyak ketidaktepatan sasaran program DKP.Bergesernya fungsi LEMP dengan penetapan BUKOPIN sebagai penyalur dana Swamitra Mina untuk nelayan juga menambah panjang mata rantai distribusi dana. Akibatnya, juragan-juragan ikan saja yang dapat memanfaatkan dana tersebut karena mereka memiliki agunan, sedang akses nelayan kecil tetap terbatas. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dan pendampingan pemerintah terhadap koperasi nelayan dan kelompok-kelompok penerima dana (Anggraini, 2007). Minimnya pengawasan ini, di antara lain penyebabnya, posisi ketenagaan penyuluh berdasar KepMen Kelautan dan Perikanan No. Kep.01/men/2001 diperbaharui dengan Kep.05/Men/2003 yang mengatur organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan belum jelas, ada yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan atau sebaliknya ada Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum memiliki petugas penyuluh sehingga petugas penyuluh pertanian merangkap sebagai tenaga penyuluh (Mei dan Bambang, 2004).

b. Terkait dengan poin a, insentif suku bunga perkreditan bagi investor perlu diberikan, di samping insentif berupa adanya kerugian bagi usaha kelautan rakyat. Selama ini, perbankan di Indonesia enggan memberikan kredit ke

pengusaha perikanan karena faktor ketidakpastian usaha. Di sinilah pentingnya, *affirmative policy* pemerintah di bidang perbankan untuk menarik investasi di bidang perikanan agar lebih berkembang. Di bidang sertifikasi sendiri, seperti halnya Jepang, Indonesia telah menerapkannya. Akan tetapi mahalnya biaya sertifikasi produk perikanan telah mendorong penurunan peluang ekspor perikanan Indonesia. Di lain sisi, menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, pemerintah masih lemah dalam pelayanan dan belum memberikan jaminan penuh untuk fasilitas ekspor tersebut.Berbeda dengan Jepang dan Thailand, mereka telah menyediakan kargo khusus dalam pengiriman baik produk perikanan maupun pertanian. Biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha menengah Indonesia antara lain *pre assessment* sekitar US$ 10 ribu dan *full assessment* US$ 20 ribu-100 ribu US$ selama lima tahun. Sekitar 80 persen dari total pelaku usaha perikanan adalah produsen perikanan skala kecil dan kesulitan membiayai sertifikasi secara swadaya (http://www.tempointeraktif.co). Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia, Bambang Suboko hal ini diperparah dengan pemahaman di pemda bahwa atas dasar proses otonomisasi daerah menyebabkan laboratorium pengecekan mutu hasil perikanan yang diperbantukan pemerintah pusat bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

c. Berbicara tentang *stock enhancement*, Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, telah menargetkan rehabilitasi kawasan laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 serta 20 juta hektar pada tahun 2020. Hingga awal 2009, realisasi kawasan laut mencapai 9,2 juta hektar.DKP juga memiliki anggaran sekitar Rp.50 miliar untuk rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Anggaran ini didukung dengan dana pemberdayaan masyarakat pesisir yang besarnya mencapai Rp.100 miliar-Rp.200 miliar. Dilihat dari anggarannya cukup fantastis, namun selama ini pelibatan koperasi nelayan, wanita nelayan dan *stakeholder* perikanan masih minim. Kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat yang berjalan selama ini hanya sepotong-sepotong sehingga kontinuitas program rehabilitasi dan *stock enhancement* tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dengan penggalangan modal sosial yang gagal, tidak mengherankan bila tingkat kerusakan kawasan laut Indonesia mencapai 80% (*Kompas*, 28 Januari 2009). Sejumlah riset menunjukkan, dengan meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian alamnya, *multiflier effect*-nya berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan PAD. Meningkatnya peran masyarakat pesisir Gunung Kidul dalam penataan *ecotourism* misalnya, berdampak pada meningkatnya PAD, diversifikasi usaha dan perekonomian masyarakat dan kelestraian lingkungan (Anggraini, 2008). Belajar dari sukses pemerintah Jepang dalam menggalang modal sosial dengan pendekatan Shiretoko maupun gerakan *Mori wa Umi no Koitobi* misalnya, perlu dikembangkan potensi kearifan lokal Indonesia yang cenderung sinergis dalam mengatur interaksi para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan keberadaannya dipayungi

oleh sistem hukum setempat. Sistem hukum yang lebih tinggi atau sistem perundangan perlu memberikan tempat yang lebih leluasa kepada sistem hukum di daerah tanpa mengurangi makna terpeliharanya pengembangan integrasi nasional. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa upaya pemerintah mendorong investasi perikanan masuk ke Indonesia bukan berarti persoalan kelestarian lingkungan boleh diabaikan. Maraknya demo masyarakat Kalimantan dan Sumatera akan penambakan udang investor yang acapkali terjadi adalah wujud anarkhisme di tengah mengucurnya rupiah hasil investasi.

d. Hambatan yang sering dialami dalam penegakan hukum terkait dengan kasus *illegal fishing* adalah minimnya pengawasan oleh pemerintah yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasana, tenaga dan biaya operasional. Memperkuat posisi dan peran Angkatan Laut Indonesia dan jalinan kerjasama dengan armada laut asing adalah salah satu solusi yang tengah dilakukan dan terus ditingkatkan. Hingga pertengahan Januari 2009, pemerintah memang telah mencabut 305 ijin usaha perikanan dan 2.497 ijin penangkapan dan kapal pengangkut ikan yang tidak beroperasi selama dua tahun.[3] Penyebabnya antara lain, adanya pelanggaran alat tangkap. Tidak ada laporan lokasi tangkap, jenis, volume hasil tangkapan dan tidak membayar pungutan hasil perikanan. Sepintas, berita ini menggembirakan, namun dilihat dari sisi pengawasan, tolerasi pemerintah selama dua tahun ini terhadap para pelanggar tersebut terlalu lama. Kerugian negara cukup besar, pungutan hasil perikanan (PHP) tahun 2008 hanya Rp.77 miliar atau 38,5 persen dari target (*Kompas,* 28 Januari 2009). Pencabutan ijin ini di sisi lain, dinilai cukup riskan karena mengakibatkan pengangguran nelayan sehingga diversifikasi usaha dan pertumbuhan perikanan budi daya perlu diintensifkan sebagai solusinya

e. Revitalisasi perikanan saat ini hanya menekankan kepada peningkatan produksi ikan tuna, udang, dan rumput laut sementara di sisi lain, kondisi sumber daya ikan nasional semakin kritis. Oleh karena itu, arah kebijakan revitalisasi perikanan hendaknya ditinjau kembal(http://ocean.iuplog.com/utility.t). Program ini bisa diarahkan untuk merevitalisasi lahan pertambakan yang sudah hancur, seperti di wilayah Pantura Jawa.Perikanan tambak udang di Pantura Jawa pada 1980-an sangat besar perannya dalam perikanan nasional. Akan tetapi, memasuki 1990- an, kejayaan tambak udang tersebut mulai hancur karena dihantui berbagai macam pencemaran.Mereformasi kebijakan pembangunan perikanan secara menyeluruh hendaknya secepatnya dilakukan.Oleh karena itu, berbagai dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan,terutama dukungan politik dari pemerintah dan pihak legislatif (http://www.tumotou.net/702-opsy/pogselpi.pdf/). Hasil-hasil riset perguruan tinggi yang selama ini dilakukan mulai dari soal perbenihan

[3] Sebagian besar kapal tangkap yang dicabut ijinnya berukuran 60 gross ton (GT)-200GT.Dengan pencabutan ijin, saat ini ada 2501 SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan 6269 SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan). Pencabutan ijin diharapkan dapat menertibkan usaha perikanan dan kapal tangkap serta menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Di samping itu, diharapkan membuka peluang bagi masuknya usaha perikanan baru yang lebih produktif.

hingga pemasaran produk dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam hal riset. Seperti juga yang telah dilakukan di Jepang dan pemerintah negara maju lainnya, hasil-hasil riset yang aplikatif akan mendapat tempat dalam pemecahan persoalan pembangunan di negaranya.

Argumen di atas juga didasari hasil riset yang dilakukan Jesper Raakjaer dan kawan kawan (2004:151) di Asia Selatan yang menandaskan pentingnya intervesi pemerintah untuk mengatasi persoalan akibat pemanfaatan sumber daya pesisir yang kurang bijak, pencegahan konflik sosial akibat pemanfaatan lahan hingga program pengayaan stock ikan. Komunitas masyarakat pesisir acapkali tidak berdaya dengan tekanan-tekanan persoalan tersebut tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat perikanan, demikian disebutnya, diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah, nelayan, koperasi nelayan, pengusaha di bidang perikanan bergandeng tangan menciptakan *co-management*. Intervensi yang sama juga telah dilakukan pemerintah Jepang dengan programnya Shiretoko World Natural Heritage area. Dampaknya, selain pengawasan pengembangan produksi perikanan dilakukan oleh masyarakat setempat, program pengayaan ikan yang dilakukan pun berjalan efektif bahkan kontribusi wisatawan meningkat (Makino, 2009: 212).

PENUTUP

Dengan melihat kondisi sumber daya ikan Indonesia yang semakin berdegradasi, pemberdayaan nelayan di luar kegiatan penangkapan ikan hendaknya perlu dirumuskan secara baik dengan melihat potensi sumber daya lokal. Penangkapan ikan

Dengan melihat kondisi sumber daya ikan Indonesia yang semakin berdegradasi, pemberdayaan nelayan di luar kegiatan penangkapan ikan hendaknya perlu dirumuskan secara baik dengan melihat potensi sumber daya lokal. Penangkapan ikan secara bijak ditopang program *stock enhancement* dan riset-riset perikanan yang menunjang pengelolaan sektor bahari serta penegakan hukum untuk mengatasi *illegal fishing*, pada gilirannya diharapkan dapat sedikit mengatasi keruwetan dalam mengelola potensi kelautan tanah air. Di samping itu, *stake holder* perikanan dan pemerintah tetap harus mewaspadai pola-pola hubungan ekonomi politik Jepang dan Amerika Serikat saat ini, perubahan fluktuatif dalam pola konsumsi, gaya hidup masyarakatnya dan krisis global akan berpengaruh signifikan pada laju ekspor perikanan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Oktiva, Kajian Restrospektif Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* UGM, volume 10, Mei 2006.

----------, 2007, Kajian Evaluatif Restrospektif Prospektif Pemberdayaan Wanita Nelayan dengan Mengoptimalkan Swamitra Mina Integratif Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di DIY, unpublished research,

----------, 2008, Modal Sosial dalam Pengembangan *Ecotourism* (Ekowisata) di kabupaten Gunung Kidul, unpublished research.

Dahuri, Rokhmin, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Dwi Erlina, Mei, Bambang G. Nuryanto., 2004, Penguatan (penataan) Kelembagaan Penyuluhan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan di Era Otonomi Daerah. Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Jakarta.

Laporan:

Japan Fishery Product Annual Report, 2007.

Internet:

Niesen, Jesper Raakjaer, Fisheries co-management-an institutional innovation? Lesson from South East Asia and Southern Africa, *Marine Policy* (28): p. 151-160, 2004, www.elsevier.com/akses 5 Januari 2009.

Mitsutaku Makino, dkk., Expanding fisheries co-management to ecosystem-based management: A Case in the Shiretoko World Natural Heritage area, Japan, *Marine Policy* (33): p. 207-214, 2009, www.elsevier.com/akses 5 Januari 2009.

http: // www.kompas.online.com/blue water crime/akses 2 Desember 2008

http://www.ocean.iuplog.com/default.asp. item=/akses 2 Januari 2009

http://www.ocean.iuplog.com/default.utility.tb/akses 10 Januari 2009)

http: //www.tumotou.net/702-opsv/pogselpi.pdf/akses 5 Januari 2009

http:// www.atani tokyo.blogspot.com./akses 5 Januari 2009

http:// www.tempointeraktif.com/akses 10 Januari 2009.

Media massa:

"Ribuan Izin Tangkap Dicabut" artikel pada *Kompas*, 28 Januari 2009.

Sindo, 21 Maret, 2003